

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan. Sampai tahun 2015, tercatat ada 35 provinsi di Indonesia. Keadaan tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mempunyai strategi khusus dalam menjaga kesatuan dari negara ini.

Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang tahun 1945 adalah dengan melimpahkan atau memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar hal yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Strategi inilah yang disebut dengan otonomi daerah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Walaupun demikian pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penerimaan yang didapat pemerintah daerah tersebut disebut juga pendapatan pemerintah.

Dalam pemerintahan, semua pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara, sedang aset dan kewajiban diakui pada saat

timbulnya hak dan kewajiban yang mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah. Pengakuan dari pos-pos tersebut kemudian akan di catat dalam neraca. Maka dari itu, pemerintah memerlukan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan tersebut adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada tanggal laporan keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara atau daerah oleh wajib setor.

Peraturan Walikota Bukittinggi No. 22 Tahun 2014 menyatakan piutang

adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Piutang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Penulis merasa bahwa DPKAD yang mempunyai data lengkap untuk penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi piutang yang digunakan di DPKAD Kota Bukittinggi. Penulis menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan selama penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bukittinggi, sehingga dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul **“PROSEDUR PENCATATAN PIUTANG PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPKAD) KOTA BUKITTINGGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan piutang pada DPKAD Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana penyajian piutang dalam neraca pada laporan keuangan DPKAD Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi piutang pada DPKAD Kota Bukittinggi periode 2015.
2. Untuk mengetahui penyajian piutang dalam neraca pada laporan keuangan DPKAD Kota Bukittinggi periode 2015.

1.4 Manfaat Penulisan

Pengharapan dari penulisan yang dilaksanakan ini ialah memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan teori-teori serta mengembangkan apa yang telah diperoleh dari bangku kuliah.

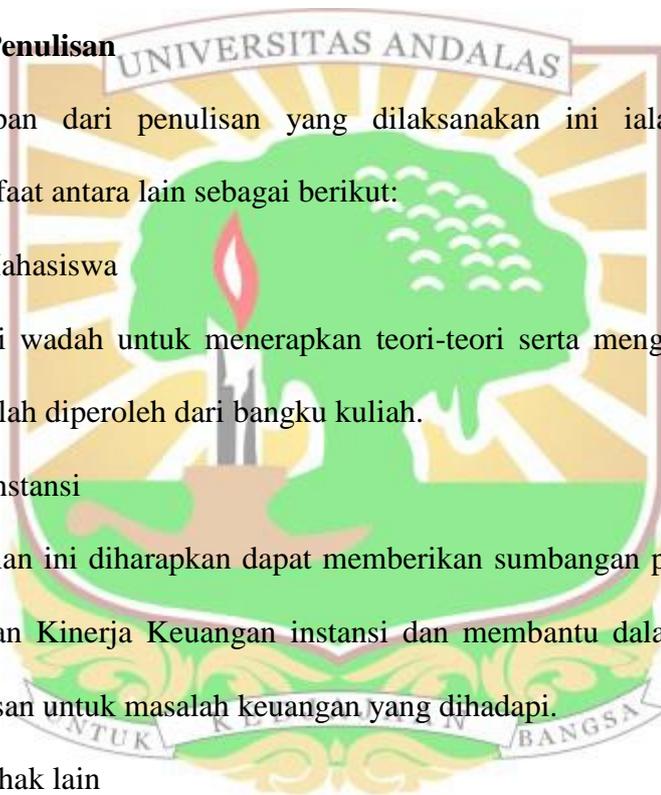
2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

3. Bagi pihak lain

A. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.

B. Sebagai bahan kajian dalam membandingkan antara bangku kuliah dan praktek di lapangan.



1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran dengan jelas tentang prosedur pencatatan piutang usaha pada DPKAD Kota Bukittinggi ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian Pengetian Sistem, Prosedur, Akuntansi, Piutang, Piutang.

BAB III Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bukittinggi

Pada bab ini membahas tentang Sejarah DPKAD Kota Bukittinggi, Dasar Hukum Berdirinya DPKAD Kota Bukittinggi, Stuktur Organisasi DPKAD Kota Bukittinggi, Rencana Strategis DPKAD Kota Bukittinggi.

BAB IV Prosedur Pencatatan Piutang pada DPKAD Kota Bukittinggi Pembahasan

Pada bab ini membahas ini tentang sistem dan prosedur akuntansi piutang pada DPKAD Kota Bukittinggi, penyajian piutang dalam neraca tahun 2015.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran kepada instansi pemerintah setelah magang dilakukan.